

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan jilbab oleh perempuan Indonesia telah menjadi fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat dalam kaitannya dengan cara perbaikan perempuan muslim. Keadaan ini berbeda dengan kondisi perempuan muslim pada periode sebelumnya. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, namun di era 80-an misalnya, penggunaan jilbab yang sekarang lebih populer disebut hijab belum menjadi hal yang fenomenal dibandingkan dengan saat ini.¹

Perkembangan jilbab mengalami pergeseran seiring dengan peranannya yang sudah menjadi kultur masyarakat. Apabila tahun 1980-an baru terlihat pada kelompok-kelompok kecil mahasiswa dan pelajar dalam komunitas aktivitas keislaman, tahun 1990-an busana muslim merebak ke berbagai kelompok masyarakat, menebus kelas menengah dan kelompok elite, dan sejak tahun 2000-an sudah menjadi budaya perempuan muslim Indonesia.²

Pada masa sebelum kemerdekaan perjuangan jilbab diwarnai polemik di media massa, namun pada masa Orde Baru perjuangan jilbab sangat berat. Perjuangan umat Islam khususnya bagi Muslimah mendapat tantangan keras dari pemerintah, khususnya pejabat dinas pendidikan dan pihak militer. Militer dalam hal ini muncul sebagai kekuatan yang sangat dominan bagi politik Orde Baru.

¹ Kemunculan Jilbab di Indonesia dalam Budiastuti, *Jilbab dalam Perspektif Sosiologi*, (Depok: FISIP UI, 2012), hal. 32.

² Moeflich Hasbullah, *Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 289.

Menurut Alwi Alatas bahwa tujuan utama dominasi militer adalah untuk mengawal terciptanya tujuan Orde Baru untuk mencita-citakan suksesnya program pembangunan yang mereka canangkan dan untuk itu membutuhkan kestabilan politik dan ekonomi yang ditopang kuat oleh kestabilan pertahanan dan keamanan.³

Sama halnya menurut Tiar Anwar Bachtiar, bahwa dalam membangun stabilitas politik dan keamanan serta pemulihan ekonomi negara, Soeharto dikelilingi tentara dan teknokrat. Tentara digunakan sebagai kekuatan untuk pemulihan keamanan nasional, sedangkan teknokrat dimanfaatkan untuk mewujudkan target ekonomi pemerintah Orde Baru.⁴

Islam politik masa pemerintahan Orde Baru mengalami fragmen dalam tubuh kekuatan politik internal umat Islam. Tidaklah mengherankan bila pemikiran dan perilaku politik umat dan elitnya pada tingkat strategis perjuangan politik terbentuk ke dalam beberapa kelompok, yaitu akomodasionis, reformis, fundamentalis. Akan tetapi, pola hubungan antara kalangan Islam dan pemerintah dalam aspek politik kultural telah mencapai kesesuaian untuk merumuskan masa depan bangsa.

Seiring dengan melemahnya kekuatan politik di tingkat eksternal, umat Islam mengalami fragmentaris politik. Selain itu, terjadi tuntutan reformulasi perubahan strategi politik perjuangan politik di kalangan elite politik Islam dan dalam tubuh organisasi. Kondisi itu menjadikan kekuatan Islam terbelah dan lemah, seperti tampak setidak-tidaknya pada paruh pertama pemerintahan Orde Baru. Kekuatan

³ Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, *Revolusi Jilbab Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri seJabotabek, 1982- 1991*, (Jakarta: Al- I'Tishom, 2001), hal. 18.

⁴ Tiar Anwar Bachtiar, *Lajur-lajur Pemikiran Islam Kilasan Pergulatan Intelektual Islam Indonesia*, (Depok: Komunitas Nuun, 2001), hal. 54.

Islam terbagi kedalam kelompok yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah dan yang menolak atau “beroposisi”. Sikap yang menolak kerjasama itu, disebabkan kebijakan politik pemerintah yang dianggap merugikan umat Islam. Organ partai Islam maupun ekonominya. Itu berarti, telah hilangnya kekuatan mandiri umat diberbagai sektor aktivitas kehidupan, kecuali sejumlah kecil elite Islam dan organisasi yang tetap bertahan dengan idealismenya.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, hubungan antara pemerintah dan umat Islam memang mengalami pasang surut. Ketika hubungan ini lantas semakin memburuk, banyak pejabat Orde Baru akhirnya lebih melihat umat Islam sebagai ancaman kestabilan politik dan pembangunan. Ketegangan terjadi karena pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang merugikan umat Islam.⁵

Kebijakan Orde Baru terhadap umat Islam memperlihatkan sifat mendua. Toleransi hanya diberikan kepada umat muslim yang tidak mengembangkan aspirasi politik dan upaya sistematis dengan melakukan penyingkiran orang-orang Masyumi yang merupakan “kaum modernis” atau “ferormis Islam”.

Ketegangan antara umat Islam dan pemerintah mengemuka antara tahun 1967 hingga paruh pertama tahun 1980-an. Pada periode ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap merugikan umat Islam, salah satunya mengenai pelarangan jilbab.⁶

Kasus pelarangan jilbab terjadi pada tahun 70-80an, yaitu ketika Depdikbud mengeluarkan peraturan untuk melarang semua siswi muslim mengenakan jilbab

⁵ www. Boombastis.com, *Fakta Kehidupan Pemakai Jilbab di Indonesia Ternyata Pernah Mengalami Teror*, 21 November 2015, diakses pada tanggal 08 September 2016.

⁶ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press,1996), hal. 26 dan 306.

ke sekolah. Pertama dari siswi SPG Negeri Bandung yang diancam dikeluarkan karena memakai jilbab. Depdikbud mengeluarkan peraturan tentang Seragam Sekolah Nasional yang menyebabkan para siswi tidak bisa mengenakan jilbab.

Walaupun telah keluar peraturan baru tentang pakaian seragam siswi- siswi sekolah negeri yang memungkinkan puteri Muslimah menggunakan busana Muslim sewaktu bersekolah, namun kasus yang pernah dilarangnya pelajar Muslimah berpakaian Muslim di sekolah negeri sesungguhnya adalah tragedi nasional.⁷

Kaum Muslim Indonesia tidak bisa lagi berlaku diam, bila hal- hal muslim ditelantarkan di negeri ini. Kita harus mengikis habis sisa- sisa tradisi kolonial yang menganggap sistem Islam sebagai sistem yang buruk dan perlu dihalangi dengan segala cara. Di zaman kemerdekaan ini, dimana kaum Muslim semakin sadar akan hak mereka sebagai warga negara, perlu ada upaya keras membuat Islam sebagai aset nasional yang senantiasa dikembangkan dan dibesarkan disegala lapisan, khususnya dikalangan generasi muda dan pelajarnya.

Namun demikian, peraturan tersebut tidak mempengaruhi semangat wanita muslim untuk mengenakan jilbab, bahkan semakin bersemangat untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak mereka untuk mengenakan jilbab.

Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 merupakan pedoman mengenai pemakaian seragam secara nasional untuk seluruh sekolah di lingkungan pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen). Surat Keputusan No.

⁷ Dr. Fuad Amsyari, *Masa Depan Umat Islam Indonesia Peluang dan Tantangan*, (Bandung: Al-bayan, 1993), hal. 94.

052/C/Kep/D.82 memiliki tujuan guna menumbuhkan rasa persamaan berdasarkan asas persatuan Indonesia. Selain itu dengan adanya penyeragaman seragam sekolah bisa memperkecil, bahkan dapat menghilangkan perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, karena pakaian seragam dapat menghilangkan sikap eksklusif.⁸

Peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1982, dijadikan sebagai landasan bagi Kepala Sekolah maupun beberapa guru di SMA Negeri untuk melarang dan menekan para siswinya yang sudah mengenakan jilbab. Para siswi yang berjilbab menerima tekanan dari pihak sekolah mulai dari tekanan halus hingga tekanan kasar, dikarenakan seragam yang mereka kenakan tidak sesuai dengan surat perjanjian yang pernah mereka tanda tangani ketika pendaftaran sekolah yaitu mematuhi segala peraturan yang diterapkan oleh pihak sekolah.

Oleh karena itu, jilbab bukan sekedar identitas muslimah yang taat di tengah masyarakat, karena jilbab diyakini sebagai kewajiban, yakni tiap perempuan muslim dewasa wajib menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan bukan hanya kalau hendak salat saja.

Pada RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) yang dilaksanakan di Jakarta dalam rapat tersebut membahas persoalan- persoalan keagamaan salah satunya tentang pakaian busana muslimat bagi siswi- siswi SLTA, yang sampai sekarang masih belum ada penyelesaiannya. Larangan yang drastis yang dikenakan kepada pelajar justru dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktenangan bagi pelajar yang

⁸ Mudjito, Kepala Humas Dan Lembaga Negara Depdikbud, "Pakaian Seragam: Tanggapan P dan K", dalam *Tempo* No. 35 Tahun XIV, 27 Oktober 1984, hal. 7.

bersangkutan karena keyakinan bathinnya goyah antara kewajiban melaksanakan ajaran agama yang diyakininya dan perintah guru yang dianggap bertentangan dengan agama yang dipeluknya.⁹

Menurut masyarakat, yaitu dari Muhammad Fam, mengenai istilah kerudung maupun jilbab ini ada perbedaan. Salah satu ayat dalam al- Quran yaitu Quran Surat An- Nur ayat 31 terdapat kata *khumur*, yaitu kain yang menutup kepala , leher dan dada (kecuali muka dan kedua telapak tangan). Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam hadist Bukhori: “Wahai Asma. Bila seorang wanita sudah dewasa, tiak boleh tampak kecuali ini dan ini (muka dan kedua telapak tangan)”. Hadits riwayat Bukhari lainnya menegaskan, “Sesungguhnya harus memakai kerudung tebal dan dapat menutup”. Jadi, jelas kerudung itu harus menutup kepala, leher dan dada. Selanjutnya, dalam Surat al- Ahzab ayat 59 terdapat kata jilbab.¹⁰ Jadi, jilbab ini dipakai setelah memakai kerudung dan yang menjadi hukumnya wajib bukan jilbab melainkan kerudung. Mengenai hal ini juga bisa di dapat dari kitab tafsir- tafsir lainnya seperti kitab tafsir Hajar At- Tabary, Al- Qurtubi, kitab Al- Mu’jamul Wasith dan kitab hadits Bukhari dan Abu Dawud.

Mengenai kasus- kasus pelarangan yang terjadi di sekolah- sekolah negeri ini akan di bahas pada bab berikutnya dengan berbagai polemik yang terjadi dan komentar- komentar yang menanggapi atau merespon kasus pelarangan jilbab tersebut.

⁹ *Panji Masyarakat*, No. 426, 21 Maret 1984, hal. 10-11

¹⁰ Menurut Al- Maraghy, dalam kitab tafsirnya, “Jilbab ialah *milayah* (pakaian luar) yang menyelubungi tubuh wanita sebagai kain rangkapan yang menutupi kerudung dan pakaian di dalam rumah, *Tempo*, 28 April 1984, komentar, Kerudung: Bukan Jilbab, hal. 12.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian tentang, Perkembangan Jilbab di Kota Bandung tahun 1980-2000 (Studi Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Bandung), penulis mendapatkan suatu permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah tentang Pelarangan Jilbab di SMA Negeri tahun 1980-2000 ?
2. Bagaimana Respon Masyarakat terhadap Pelarangan Jilbab di Kota Bandung tahun 1980-2000?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengetahui permasalahan tentang, Perkembangan Jilbab di Kota Bandung tahun 1980-2000 (Studi Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Bandung) maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Kebijakan Pemerintah terhadap Pelarangan Jilbab di SMA Negeri tahun 1980-2000.
2. Mengetahui Respon Masyarakat terhadap Pelarangan Jilbab di Kota Bandung tahun 1980-2000.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai perkembangan Jilbab di Kota Bandung tahun 1980-2000 (Studi Kasus Larangan Jilbab di SMA Negeri Bandung), telah dilakukan oleh para sarjana terdahulu atau para sejarawan. Akan tetapi mereka lebih menitikberatkan

kajiannya pada aspek politik, pendidikan dan model- model jilbab atau perkembangan jilbabnya saja.

Adapun studi yang penulis lihat dari skripsi- skripsi terdahulu yang ada kaitannya dengan judul yaitu:

- a. Nurul Hasanah, tentang Respon Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal (1982-1986), yang isinya “Asas Tunggal merupakan kebijakan monolitik yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Tujuannya untuk stabilitas politik dan ekonomi negara Indonesia yang tertuang dalam UU no. 8 dan no. 3 tahun 1985”.
- b. Siti Irma Nurmalasari, tentang Respon Pemerintah Orde Baru terhadap Aspirasi Sosial Keagamaan Umat Islam (1966- 1994) yang isinya “Orientasi Pemerintah Orde Baru yang menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial politik menyebabkan Umat Islam harus mengadaptasikan orientasi perjuangannya mengikuti arus modernisasi (pembangunan)”.
- c. Jajang Fuadi, tentang Pemikiran Politik Islam Indonesia Masa Orde Baru dari pasca Azas Tunggal sampai lahirnya ICMI, yang isinya “Islam pada masa Orde Baru semula dipenuhi kekhawatiran sekaligus sebagai harapan, mengingat Umat Islam cukup berperan dalam proses lahirnya Orde Baru”.
- d. Bawaihi, tentang Marjinalisasi Peranan Politik Islam Masa Orde Baru : Study Historis terhadap usaha Rehabilitasi Masyumi 1966- 1968, yang isinya pemerintah Orde Baru melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol dan merekayasa infrastruktur, terutama kepartaian. Hal

ini dilakukan karena partai politik dianggap sebagai penyebab utama ketidakstabilan politik yang berakibat pada krisis ekonomi”.

- e. Siti Mariah Yasmin, tentang Respon Persatuan Islam terhadap pemberlakuan Azas Tunggal 1985, yang isinya “Pancasila merupakan dasar Negara atau ideologi Negara, yang kemudian dijadikan sebagai doktrin ideologi untuk menggiring rakyat pada demokrasi terpimpin dan poros Naskom”.
- f. Enti Fatimah, tentang NU pada masa Orde Baru (1973- 1984), yang isinya “Pemberlakuan fusi partai sebagai salah satu kebijakan politiknya dalam upaya mewujudkan stabilitas politik NU sebagai bagian integral dalam wacana perpolitikan Indonesia difusikan ke dalam PPP”.
- g. Susi, tentang Peranan MUI Kota Bandung dalam mewujudkan program Bandung Agamis pada tahun 2008, yang isinya”Dalam program unggulan Pemerintah Kota Bandung terlihat eksistensinya dengan mengikuti dan merencanakan beberapa kegiatan, sehingga dalam perannya mewujudkan program dapat mmepengaruhi keadaan sosial keagamaan”.
- h. Asti Agharani Dwiputri Dimjati, tentang Perkembangan Mode Kerudung di Bandung 1970- 2000 yang isinya” Setiap periodenya mode kerudung mengalami perkembangan. Pada tahun 1980-an para pengguna kerudung di Bandung pernah dihadapkan pada politik Pemerintah sehingga para pelajar di sekolah Negeri Bandung mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan sehingga mengalami pemecatan di sekolah”.

Selain itu juga buku- buku yang dapat menunjang penelitian ini yaitu buku karya Alwi Alatas yang merupakan buku hasil penelitiannya di lapangan mengenai revolusi jilbab yang terjadi kasus pelarangan jilbab di Indonesia. Kemudian buku dari Aqib Suminto yang isinya memuat tentang kebijakan- kebijakan pada masa Hindia Belanda karena buku ini juga sebagai gambaran dari kebijaka politik pada masa Orde Baru. Dan banyak lagi buku- buku sebagai penunjang dalam Penelitian ini terutama yang berhubungan dengan metode penulisan dan juga dalam materi penelitiannya.

E. Langkah- langkah Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian sejarah, yaitu penelitian yang mempelajari kejadian- kejadian atau peristiwa- peristiwa masa lampau. Tujuannya yaitu untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, memverifikasi serta mensintesisakan bukti- bukti menegakkan fakta- fakta untuk memperoleh kesimpulan yang kuat.¹¹

Sejarah sebagai suatu konstruk, selalu merupakan suatu kesatuan yang koheren. Koherensi itu mengandung tuntutan bahwa unsur- unsur data, pada dasarnya ada saling ketergantungan, terutama fungsi- fungsinya. Kesemuanya itu berfungsi untuk mendukung fungsi keseluruhannya.¹²

¹¹ E. Kosim. *Metode Sejarah, asas dan proses*, Universitas Padjadjaran Fakultas Sastra Jurusan Sejarah: Bandung

¹² Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia jilid 1 dan V*. (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 54.

Dalam penyusunan rencana penelitian, peneliti akan dihadapkan pada tahap pemilihan metode atau teknik pelaksanaan penelitian. Metode historis bertumpu pada empat langkah kegiatan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.¹³

1. Heuristik

Dalam uraian tentang heuristik (pengumpulan sumber), peneliti harus menjelaskan sumber- sumber apakah yang harus dicari, bagaimana mencari, dan dimana mencari sumber- sumber tersebut. Heuristik berasal dari kata Yunani *heurishein* artinya memperoleh.¹⁴

Peneliti mencari sumber primer yang berupa majalah, koran, dan arsip. Selain itu juga peneliti mencari sumber sekunder yang berupa buku yang digunakan peneliti sebagai pelengkap dari sumber primer. Mengenai sumber yang berupa buku dan majalah peneliti mendapatkannya di berbagai perpustakaan misalnya perpustakaan yang sudah dikunjungi oleh peneliti yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas ADHUM, mencari sumber dalam bentuk skripsi yang terdahulu.
- b. Perpustakaan UIN Bandung, yang berupa buku- buku penunjang dan majalah- majalah sebagai sumber primernya.
- c. Batu Api, tentang sumber- sumber yang berhubungan dengan judul yang diteliti.
- d. Perpustakaan Nasional di Jakarta.

¹³ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hal. 54

¹⁴ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian*hal. 54

- e. Perpustakaan Bapusipda, kemudian mengenai sumber yang berupa arsip, peneliti mengunjungi arsip Bapusipda.
- f. Arsip Kota Bandung.

Data-data yang diperoleh peneliti dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder, di antaranya:

a. Sumber primer

Sumber primer yang didapat dari penelitian tentang Perkembangan Jilbab di Kota Bandung Tahun 1980-2000 (Studi kasus pelarangan jilbab di SMA), ini peneliti dapatkan dari berbagai sumber seperti:

- 1) Majalah Panjimas (Panji Masyarakat)
- 2) Majalah Tempo
- 3) Koran
- 4) Wawancara dengan Sekretaris Umum MUI Kota Bandung
- 5) Arsip tentang Pedoman seragam sekolah, surat keputusan Dirjen PDM, Departemen P dan K. No. 052/C/Kep/D/1982, Jakarta:17 Maret 1982. Salinan dari dokumen asli yang dimuat dalam pdf tentang sk-052-1982 pada bulan Mei 2016.

b. Sumber sekunder

Sumber-sumber sekunder yang hampir seluruhnya diambil dari buku-buku serta artikel-artikel secara umum digunakan sebagai bahan pendukung bagi penelitian ini yaitu diantaranya:

- 1) Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, Revolusi Jilbab Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri seJabotabek, 1982- 1991, (Jakarta: Al- I'Tishom, 2001).

- 2) Tiar Anwar Bachtiar, Lajur-lajur Pemikiran Islam Kilasan Pergulatan Intelektual Islam Indonesia, (Depok: Komunitas Nuun, 2001).
- 3) E. Kosim. Metode Sejarah, Asas dan Proses, Universitas Padjadjaran Fakultas Sastra Jurusan Sejarah: Bandung
- 4) Sartono Kartodirdjo, Sejarah Nasional Indonesia jilid 1 dan V. (Jakarta: Balai Pustaka).
- 5) Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- 6) Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- 7) Dr. Fuad Amsyari, Masa Depan Umat Islam Indonesia Peluang dan Tantangan, (Bandung: Al-bayan, 1993).

2. Kritik

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap yang berikutnya adalah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang juga harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.¹⁵

¹⁵ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian*hal. 58-59.

a. Kritik Intern

- 1) Pedoman seragam sekolah, surat keputusan Dirjen PDM, Departemen P dan K. No. 052/C/Kep/D/1982, Jakarta:17 Maret 1982. Salinan dari dokumen asli yang dimuat dalam pdf tentang sk-052-1982 pada bulan mei 2016.

Dalam sk 052 ini terdapat ketentuan- ketentuan mengenai seragam sekolah mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA, dan bagi siswi yang mengenakan jilbab dinamakan seragam khas.

- 2) Majalah Tempo

Majalah Tempo merupakan pers yang memiliki visi intelektual, atau visi pembaharuan dan itulah yang menjadi serangkaian nilai dasar sekaligus menentukan visi penerbitan. Tempo merupakan majalah nasional yang mencakup seluruh Indonesia. Untuk ukuran pada saat tahun 1980an, tempo merupakan majalah yang banyak pembacanya. Dalam hal ini, mantan redaktur Tempo, Yulizar Kasiri menandakan bahwa “ Tempo menangkap gagasan- gagasan neo-modernis Islam. Majalah Tempo, yang didalamnya memuat beberapa peristiwa salah satunya tentang berbagai kasus pelarangan jilbab, dan majalah ini isinya lebih menekankan pada masalah politik, baik politik pemerintahan Indonesia maupun politik Islam.

- 3) Majalah Panji Masyarakat (Panjimas)

Majalah ini berdiri pada 15 Juni 1959 oleh faqih Usman, Hamka dan Yunan Nasution. Panjimas merupakan majalah yang selalu menebar nilai- nilai pembaharuan pemikiran Islam. Majalah ini diasuh oleh generasi tua seperti

Hamka, yang sangat menentang pemikiran Cak Nur. Namun uniknya, majalah ini justru memuat tulisan- tulisan Cak Nur. Hal ini mengindikasikan bahwa Panjimas merupakan majalah yang menjadi motor penggerak pembaharuan Islam di Indonesia. Seperti halnya dengan majalah Tempo, majalah Panjimas juga didalamnya memuat tentang peristiwa pelarangan Jilbab, namun dalam majalah ini isinya lebih ditekankan kepada keislaman atau keagamaan.

b. Kritik Ekstern

- 1) Pedoman seragam sekolah, surat keputusan Dirjen PDM, Departemen P dan K. No. 052/C/Kep/D/1982, Jakarta:17 Maret 1982. Salinan dari dokumen asli yang dimuat dalam pdf tentang sk-052-1982 pada bulan mei 2016.

Sk 052 ini di dapat dari internet, keadaan kertas dalam file ini sudah mulai berubah warna kertasnya menjadi agak kecoklatan dan sedikit kurang jelas tulisannya karena merupakan hasil ketikan jaman dahu yang memakai mesin tik.

- 2) Majalah Tempo

Majalah tempo yang diperoleh ini telah dibundel yang sesuai dengan tahunnya, keadaan kertasnya ada yang sudah menguning tetapi masih bisa dibaca dan ada juga yang sudah agak robek sedikit tetapi juga masih bisa dibaca.

- 3) Majalah Panji Masyarakat (Panjimas)

Majalah ini sama seperti majalah tempo yang keadaan majalahnya telah dibundelkan yang sesuai dengan tahun, keadaan kertas sudah agak

menguning karena sesuai dengan usia majalahnya, tetapi walaupun demikian majalah tersebut masih bisa untuk di baca dan juga masih dapat digunakan sebagai sumber penelitian.

Dengan demikian sumber- sumber yang penulis dapatkan ini berasal dari sebuah arsip atau dokumen penting tentang SK 052 dan majalah- majalah yaitu diantaranya majalah Tempo dan Panjimas (Panji Masyarakat), karena majalah ini berperan sangat penting bagi penulis sebagai sumber dalam penyusunan skripsi, serta sumber yang berasal dari Risalah dan Serial Media Dakwah.

3. Interpretasi

Interpretasi dalam sejarah sering disebut dengan analisis sejarah dengan menguraikan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan.¹⁶ sumber- sumber yang peneliti dapatkan kemudian di analisis berdasarkan fakta historisnya setelah itu disintetiskan melalui eksplanasi sejarah.

Pembahasan mengenai Perkembangan Jilbab di Kota Bandung tahun 1980-2000 (Studi Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Bandung), untuk memudahkan dalam melakukan penelitian pada tahapan ini penulis menggunakan teori *challenge and response* (tantangan dan tanggapan) karena teori ini merupakan konsep filsafat sejarah dari A. J. Toynbee yang paling utama yaitu rumusan tentang perkembangan dan pertumbuhan, merupakan tantangan yang akan mengakibatkan tanggapan yang berhasil yang melahirkan tantangan baru yang lebih segar yang akan membangkitkan tanggapan lain lagi dan seterusnya. Kemudian dia

¹⁶ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian...*, hal. 64.

menegaskan bahwa keadaan kacau merupakan bentuk proses disintegrasi ketika setiap kegagalan untuk menanggapi tantangan telah siap sedia. Selanjutnya, kegagalan suatu tanggapan menghasilkan pengunduran diri menuju kekalahan dan disiplin yang kendor, namun kegagalan tersebut tidak menyeluruh dan menentukan.¹⁷

Pandangan A.J. Toynbee tentang teori *challenge and response* dianggap sebagai faktor positif yang benar-benar mempunyai peranan yang sangat besar dalam menciptakan peradaban. Hal ini karena penciptaan pada dasarnya merupakan hasil pertemuan berbagai upaya manusia dan permulaan peradaban adalah hasil interaksinya. Jadi situasi-situasi sulitlah dan bukan situasi yang mudah dalam membangun peradaban berbagai bangsa didunia. Pada dasarnya tantangan merupakan faktor pembangkit vitalitas yang luar biasa dalam masyarakat, akan tetapi tantangan tersebut tidak mungkin datang secara terus menerus.

Menurut A.J. Toynbee, muncul dan runtuhnya suatu peradaban adalah akibat berhasil tidaknya ia merespon tantangan tertentu. Kemudian ia menegaskan bahwa “semakin besar tantangan semakin besar pula dorongan”.¹⁸ Dengan demikian tantangan yang dihadapi masyarakat dapat membangkitkan kehendak untuk menghadapinya dan menghasilkan reaksi.

Pada masa awal rezim Orde Baru, Islam dipandang sebagai penghambat modernisasi, kemajuan serta pertumbuhan ekonomi, sehingga timbul kesan Islam

¹⁷ Arnold J. Toynbee, *A Study Of History*, Volume VI, Oxford University Press, London, 1954, hal 174.

¹⁸ Fauzia Bairun, *Malik Bennabi His Life and Theory of Civilization*, Budaya Ilmu Sdn. Bhn, Kuala Lumpur, Terj. Munir A. Muin, Pustaka, 1993, hal 130.

identik dengan kebodohan dan keterbelakangan serta radikal. Maka pemerintah berusaha mematkan peran politik umat Islam.

Ketegangan terjadi karena pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang merugikan umat Islam dan pada masa orde baru ini pemerintah cenderung menekan Islam politis dan ini termasuk pelarangan penggunaan jilbab.¹⁹

Jilbab merupakan pakaian perempuan muslim yang dianggap dapat memenuhi kriteria menutup aurat dan merupakan kewajiban bagi setiap perempuan beriman. Hal itu jelas tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jilbab bukan sekedar identitas muslimah yang taat di tengah masyarakat, karena jilbab diyakini sebagai kewajiban, yakni tiap perempuan muslim dewasa wajib menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan bukan hanya kalau hendak salat saja.

Dalam hal ini bagi pelajar yang memutuskan untuk mengenakan jilbab pada tahun 1980-an menghadapi berbagai kendala. Hal itu terjadi karena mereka harus menghadapi penolakan dari orang tua yang dikarenakan takut anaknya akan sulit mendapatkan kerja, disebabkan penggunaan jilbab masih belum umum digunakan di masyarakat. Jilbab belum umum digunakan disebabkan pakaian ini hanya biasa dikenakan oleh ibu-ibu, terutama mereka yang bergelar hajjah sebagai penanda bahwa seorang perempuan sudah melaksanakan ibadah haji.

¹⁹ www. Boombastis.com, *Fakta Kehidupan Pemakai Jilbab di Indonesia Ternyata Pernah Mengalami Teror*, 21 November 2015, diakses pada tanggal 08 September 2016.

4. Historiografi

Penulisan sebagai tahap akhir dari prosedur penelitian sejarah ini menurut aspek kronologis dan penyajiannya berdasarkan tema- tema penting dari setiap perkembangan objek penelitian.

Setelah terkumpulnya sumber- sumber kemudian dikritik baik secara ekstern maupun secara intern, lalu di interpretasikan, setelah itu barulah di lakukan penulisan atau historiografi. Penulisan ini merupakan suatu usaha merekonstruksikan masa lampau untuk memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi yaitu:

Bab I, memuat tentang Pendahuluan diantaranya meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan langkah- langkah penelitian. Dalam langkah- langkah penelitian ini mencakup heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Bab II, memuat tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelarangan Jilbab di SMA Negeri, diantaranya tentang kondisi sosial dan politik pada tahun 1980, dan kebijakan pelarangan jilbab di sekolah negeri.

Bab III, memuat tentang peristiwa yang sedang di teliti atau bagian akhir dalam sebuah permasalahan yang diteliti yaitu tentang Respon Masyarakat Terhadap Pelarangan Jilbab, diantaranya tentang penerapan kebijakan larangan jilbab di SMA Kodya Bandung, respon masyarakat terhadap pelarangan jilbab yang meliputi respon sekolah, respon lembaga keagamaan dan respon masyarakat dalam surat pembaca serta respon dari pemerintah terhadap gejolak yang terjadi di masyarakat yaitu mengenai pelarangan jilbab.

Bab IV, yang merupakan penutup atau simpulan dari sebuah penelitian yang telah penulis terhadap pembaca atau terhadap pihak yang akan melakukan penelitian pada waktu yang akan datang.

